

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat Penelitian.....	13
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2. Manfaat Praktis.....	13
1.5. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Teori.....	16
2.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	18

2.1.2.	Teori Kewenangan Hukum	23
2.2.	Tinjauan Konseptual.....	29
2.2.1.	Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS)	30
2.2.2.	Tinjauan Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	40
2.2.3.	Tinjauan Tentang Penyidik	43
2.2.4.	Tinjauan Tentang PPNS pada Beberapa Instansi.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....		84
3.1.	Jenis Penelitian	84
3.2.	Jenis Data	85
3.3.	Cara Perolehan Data	88
3.4.	Jenis Pendekatan.....	89
3.5.	Analisa Data	89
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		90
4.1.	Hasil Penelitian Tentang Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	90
4.2.	Analisis Data	102
4.2.1.	Analisis Atas Kedudukan dan Kewenangan PPNS Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....	102
4.2.2.	Analisis Atas Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan PPNS Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.....	131

4.3.	Peran PPNS dalam Beberapa Instansi	149
4.3.1.	PPNS Penataan Ruang	149
4.3.2.	PPNS Keimigrasian	162
4.3.3.	PPNS Perpajakan	173
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		179
5.1.	Kesimpulan.....	179
5.1.1.	Kesimpulan Atas Kedudukan dan Kewenangan PPNS Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	179
5.1.2.	Kesimpulan Atas Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan PPNS Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	180
5.2.	Saran	182
5.2.1.	Implisit Atas Kedudukan dan Kewenangan PPNS Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	182
5.2.2.	Implisit Atas Kepastian Hukum Terhadap Kedudukan Dan Kewenangan PPNS Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia	182
DAFTAR PUSTAKA		184